

# EKONOMI MONETER DAN FISKAL

**Dr. Rahmayati, M.E.I**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan modul mata kuliah Ekonomi Moneter dan Fiskal. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah beberapa tahun mengajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, banyak pengalaman yang mendorong penulis untuk menulis sebuah modul yang dapat meningkatkan minat mahasiswa dalam belajar karena modul memiliki kejelasan bahasa dan dengan metode yang mudah dipahami. Didalam modul terdapat bahan ajar yang akan disampaikan dosen kepada mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai mata kuliah wajib yang akan dipelajari mahasiswa selama satu semester.

Ilmu dari Ekonomi Moneter Dan Fiskal sangat diperlukan bagi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah dikarenakan bagian dari penjelasan secara teori yang mempelajari pentingnya pengambil kebijakan pada permasalahan moneter dan fiskal karena perbankan syariah bagian dari ruang lingkup kebijakan moneter dalam program studi Perbankan Syariah.

Penulis menyadari penyusunan modul Ekonomi Moneter Dan Fiskal ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan, akhirnya kepada bapak/ibu dosen dan para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran untuk lebih baik kedepannya.

**Medan, 20 Mei 2021**

**Tim Teacing Mata Kuliah**

(Dr. Rahmayati, MEI)

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>I. IDENTITAS</b> .....	
a. Nama Mata kuliah .....	
b. Kode Mata kuliah .....	
c. Jumlah SKS .....	
d. Nama Dosen/ <i>Team Teaching</i> .....	
<b>II. PENDAHULUAN</b> .....	
a. Deskripsi Mata Kuliah .....	
b. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.....	
c. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.....	
<b>III. PEMBELAJARAN</b> .....	
a. Kegiatan Pembelajaran ke 1 .....	
1. Uang Dan Bank Sentral.....	
2. Tujuan Materi Pembelajaran .....	
3. Materi Pembelajaran .....	
4. Tugas/Latihan.....	
5. Evaluasi .....	
b. Kegiatan Pembelajaran ke 2.....	
Uang Dan Bank Sentral (Lanjutan).....	
1. Tujuan Materi Pembelajaran .....	
2. Materi Pembelajaran .....	
3. Tugas/Latihan.....	
4. Evaluasi .....	
c. Kegiatan Pembelajaran ke 3	

**IV. PENUTUP.....**  
**DAFTAR PUSTAKA**

## **I. IDENTITAS MATAKULIAH**

- A. Nama mata kuliah** : Ekonomi Moneter Dan Fiskal
- B. Kode mata kuliah** :
- C. Jumlah sks** : 3 sks
- D. Nama dosen/team teaching** : 1. Dr. Rahmayati, M.E.I

## II. PENDAHULUAN

### A. Deskripsi Mahasiswa

Mata kuliah Ekonomi Moneter Dan Fiskal ini ialah mata kuliah yang membahas mengenai kebijakan-kebijakan terkait moneter dan fiskal. Memiliki tujuan agar mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini akan dapat menjelaskan bagaimana pengaturan dari kebijakan moneter dan fiskal. Mata kuliah ini membahas tentang (1) Uang Dan Bank Sentral, (2) Pendalaman materi mengenai uang dan kebijakannya, (3) Kebijakan Moneter Dalam Kebijakan Kurs, (4) Bank Sentral dan Kebijakan Moneter, (5) Strategi Kebijakan Moneter Bagi Stabilitas Negara, (6) Strategi Kebijakan Moneter Bagi Stabilitas Negara (Lanjutan), (7) Strategi Kebijakan Moneter Bagi Stabilitas Negara (Lanjutan), (8) Proses Penawaran Uang Dan Manajemen Moneter, (9) Proses Penawaran Uang Dan Manajemen Moneter (Lanjutan), (10) Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Dan Permintaan Uang, (11) Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Dan Permintaan Uang (Lanjutan), (12) Inflasi Kebijakan Moneter Di Negara Asia Pasifik.

Untuk mencapai tujuan dan isi materi tersebut digunakan metode pembelajaran Tatap muka langsung dan tidak langsung, *problem solving*, *problem based learning*, *discovery learning*, *small group discussion*, dan simulasi, dengan teknik penyampaian materi pembelajaran menggunakan nilai-nilai Al-Islam dan kemuhammadiyah. Penilaian (evaluasi) terdiri dari tiga komponen yaitu **TTM 30%** (Kehadiran 20%, UTS 40% dan UAS 40%), **TT 30%** (MR 20%, TR 20%, JR 30%, dan MRch 30%), **TM 30%** (MR 60%, dan TR 40%), dan **Attitude 10%**, yang semuanya bersumber dari tiga aspek, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik.

### B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mahasiswa mampu memahami mengenai ekonomi moneter dan kebijakan fiskal serta bertanggungjawab berdasarkan nilai-nilai Al-Islam dan kemuhammadiyah.

### C. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

1. Mahasiswa memahami konsep uang
2. Mahasiswa dipersiapkan untuk memahami fungsi dan tugas Bank Sentral
3. Mahasiswa memahami kebijakan moneter dan kurs
4. Mahasiswa memahami mengenai kebijakan moneter dan Bank Sentral

5. Mahasiswa memahami mengenai strategi kebijakan moneter bagi stabilitas negara
6. Mahasiswa mampu menganalisis strategi kebijakan moneter bagi stabilitas negara
7. Mahasiswa dapat menganalisis strategi kebijakan moneter bagi stabilitas negara
8. Mahasiswa dapat menganalisis proses penawaran uang
9. Mahasiswa mampu memahami manajemen moneter
10. Mahasiswa memahami mekanisme transmisi kebijakan moneter
11. Mahasiswa memahami mekanisme transmisi permintaan uang
12. Mahasiswa memahami inflasi kebijakan moneter di negara Asia pasifik
13. Mahasiswa mampu merancang sebuah penelitian dan menuangkannya kedalam bentuk sebuah laporan secara mandiri, terukur, dan bebas plagiasi dengan benar dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai Al-Islam dan kemuhammadiyah.

### III. PEMBELAJARAN

#### A. Kegiatan Pembelajaran 1:

##### 1. Uang Dan Bank Sentral

##### 2. Tujuan Materi Pembelajaran:

Adapun tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini ialah sebagai berikut:

- a) Mahasiswa mengetahui fungsi uang;
- b) Mahasiswa mengetahui peran Bank Sentral;

##### 3. Materi Pembelajaran

###### 1. Sejarah Perkembangan Uang

Tentunya Anda sudah mengenal apa yang dinamakan uang. Dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita selalu bersinggungan dengan uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari sampai pada tujuan investasi. Uang yang kita kenal sekarang ini sudah mengalami proses perkembangan yang sangat panjang. Setidaknya terdapat lima tahapan dalam sejarah perkembangan uang, yaitu 1. sebelum perdagangan barter, 2. perdagangan barter, 3. uang barang, 4. uang logam, dan 5. uang kertas. Kelima tahap ini akan diuraikan satu per satu.

###### a) Tahap Sebelum Perdagangan Barter

Kebutuhan manusia memiliki sifat tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan sangat terbatas sehingga manusia kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Awalnya, setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya melalui usaha sendiri. Usaha tersebut dilakukan antara lain dengan cara berburu, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, serta mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri. Perkembangan selanjutnya manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa apa yang dilakukannya tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya.

###### b) Tahap Perdagangan Barter

Ketika menyadari bahwa kebutuhan sehari-hari tidak bisa dicukupi sendiri dan adanya keterbatasan alat pemuas kebutuhan maka manusia berupaya memperbanyak ragam alat pemuas kebutuhan dengan jalan melakukan pertukaran. Pada tahap awal mereka melakukan penukaran antara barang dengan barang dari masyarakat yang saling membutuhkan, akibatnya muncullah sistem barter. Sistem barter yaitu barang yang ditukar

dengan barang. Sistem barter ini merupakan tingkat kedua dari perkembangan perekonomian. Barter adalah pertukaran atas suatu barang terhadap jenis barang yang lain. Dalam suatu pertukaran dengan menggunakan cara barter ini harus dipenuhi syarat berupa adanya kesamaan keinginan (*double coincidence of wants*) dari pihak yang terlibat barter. Menyamakan keinginan dari pihak-pihak yang terlibat barter ini tidaklah mudah, sehingga syarat "*double coincidence of want*" ini sekaligus menjadi hambatan yang terjadi dalam transaksi dengan menggunakan cara barter ini.

Namun demikian bukan berarti masalah pemenuhan semua kebutuhan bisa diatasi. Dalam perkembangannya mulai timbul kesulitan-kesulitan dalam penerapan sistem ini. Setidaknya ada dua kesulitan yang timbul dari adanya perdagangan barter antara lain adalah kesulitan menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya serta kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya. Untuk lebih jelasnya perhatikan kedua kasus berikut ini.

### **Kasus 1**

Misalnya pak Andi memiliki setandan pisang dan membutuhkan beras untuk makan. Ia bertemu pak Narto yang memiliki beras namun menginginkan pisang.

### **Kasus 2**

Pak Andi memiliki setandan pisang dan membutuhkan beras. Pak Narto memiliki beras namun ia membutuhkan ikan. Pak Bambang memiliki ikan dan membutuhkan pisang.

Pada kasus 1 karena adanya *double coincidence of wants*, kedua pihak yang saling membutuhkan bertemu dan terjadilah pertukaran barang atau barter. Namun apakah demikian juga terjadi pada kasus 2? Pada kasus 2 tidak ada *double coincidence of wants* sehingga pertukaran tidak bisa dilakukan, karena tidak memiliki kebutuhan yang sama. Dengan semakin berkembangnya perekonomian maka kebutuhan manusia juga semakin banyak sehingga menuntut tersedianya pemuas kebutuhan. Maka pola perdagangan barter menjadi tidak efektif lagi.

Dengan demikian bisa dicatat beberapa kelemahan dalam perdagangan barter:

- 1) pola perdagangan barter hanya dapat dilakukan dalam skala kecil dan tidak bisa dilakukan secara besar-besaran;

- 2) pola perdagangan barter pertukaran apabila dilakukan akan memerlukan waktu yang relatif lama karena menunggu adanya *double coincidence of wants*;
- 3) perekonomian yang menggunakan pola barter sulit berkembang karena terhambat adanya *double coincidence of wants* yang memerlukan waktu yang relatif lama;
- 4) nilai barang dalam pola perdagangan barter akan sangat kabur karena tidak ada alat ukur nilai yang pasti.

**c) Tahap Uang Barang (*Commodity Money*)**

Untuk mengatasi kesulitan yang timbul pada perdagangan barter, maka ada pemikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda-benda yang diterima oleh umum (*generally accepted*) benda-benda yang dipilih bernilai tinggi (sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik), atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari; misalnya garam yang oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang; orang Inggris menyebut upah sebagai *salary* yang berasal dari bahasa Latin *salarium* yang berarti garam.

Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada. Kesulitan-kesulitan itu antara lain karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan sehingga penentuan nilai uang, penyimpanan (*storage*), dan pengangkutan (*transportation*) menjadi sulit dilakukan serta timbul pula kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga mudah hancur atau tidak tahan lama. Penduduk asli Bandiagara di pedalaman benua Afrika mempertukarkan hasil pertaniannya, dari sebakul tomat dengan sejumlah kebutuhan harian, susu, gandum dan sejenisnya. Transaksi yang awalnya dilakukan dengan barter ini kemudian berkembang dengan menggunakan alat tukar yang terbuat dari hasil bumi seperti coklat dan sejenisnya (uang komoditi).

Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan pertukaran tetap ada di antaranya:

- nilai yang dipertukarkan belum mempunyai pecahan;
- banyak jenis uang barang yang beredar dan hanya berlaku di masing-masing daerah;
- sulit untuk penyimpanan (*storage*) dan pengangkutan (*transportation*);
- mudah hancur atau tidak tahan lama.

#### **d) Tahap Uang Logam**

Uang logam mulai banyak digunakan pada abad ke-18, yakni uang logam baik berupa uang perak maupun uang emas dan kemudian berlaku standar emas sampai awal abad ke-20. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang logam emas dan perak juga disebut sebagai uang penuh (*full bodied money*). Artinya, nilai intrinsik (nilai bahan) uang sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut). Pada saat itu, setiap orang berhak menempa uang, melebur, menjual atau memakainya, dan mempunyai hak tidak terbatas dalam menyimpan uang logam. Penggunaan emas dan perak sebagai bahan uang dalam bentuk koin diciptakan oleh Croesus di Yunani sekitar 560-546 SM. Pada saat yang bersamaan, medium uang yang berfungsi sebagai instrumen alat bayar mulai dikembangkan, dibuat dari berbagai benda padat lainnya seperti tembikar, keramik atau perunggu. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, maka tukar-menukar menggunakan uang logam juga berkembang, sementara jumlah logam mulia terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar (sulit dalam hal penyimpanan dan pengangkutan). Dalam sistem ini, nilai uang ditentukan oleh nilai intrinsik dari jenis uang tersebut. Karena uang mempunyai nilai intrinsik, maka tidak ada kebutuhan dari pemerintah untuk menjamin nilai uang tersebut. Nilai uang ditentukan oleh kekuatan pasar melalui penawaran dan permintaan akan perak dan emas, namun penawaran uang akan dibatasi oleh seberapa besar logam mulia bisa ditambang. Oleh karena itu diperlukan kontrol oleh pemerintah untuk menstabilkan sistem finansial. Keterbatasan ini yang menjadi salah satu penyebab ambruknya Sistem Standar Emas.

#### e) Tahap Uang Kertas

Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul suatu kesulitan ketika perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam bertambah sementara jumlah logam mulia (emas dan perak) sangat terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar sehingga diciptakanlah *uang kertas*. Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat/perantara untuk melakukan transaksi. Mereka menjadikan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100 persen dengan emas atau perak yang disimpan di pandai emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Nilai dari uang kertas bukan ditentukan oleh nilai intrinsiknya melainkan oleh daya beli dari uang tersebut. Uang kertas ini digunakan secara luas karena lebih sesuai sebagai medium pertukaran. Desa Jachymod di Ceko, Eropa Timur, dianggap sebagai wilayah pertama yang menggunakan mata uang yang diberi nama dolar, yang merupakan mata uang yang paling populer di abad modern. Mulanya disebut *Taler*, kemudian orang Italia mengejanya menjadi *Tallero*, lidah Belanda menuturkan *daler*, Hawai *dala*, dalam dialek Inggris diungkapkan sebagai *dollar*. Embrio dolar dibuat dari bahan baku perak dan emas dalam bentuk koin. Pada mulanya, *taler* sendiri adalah sebutan mata uang yang berkembang di daratan benua Eropa sejak abad ke-16 yang jenisnya lebih dari 1500. Namun dalam peradaban modern, masing-masing bangsa atau negara menciptakan sebutan tersendiri bagi mata uangnya untuk menunjukkan statusnya yang independen.

#### 4. Tugas/Latihan

Setiap mahasiswa membuat flowchart perkembangan dari uang ada di kehidupan manusia?

#### 5. Evaluasi

Setiap mahasiswa menganalisa keutamaan dan kelemahan sistem uang lalu memilih konsep penggunaan uang yang efektif untuk saat ini?

## **B. Kegiatan Pembelajaran 2**

### **1. Materi Pembelajaran : Uang Dan Bank Sentral (Lanjutan)**

### **2. Tujuan Pembelajaran:**

Adapun tujuan pembelajaran materi ini sebagai berikut:

- a) Mahasiswa mampu memahami fungsi Bank Sentral;
- b) Mahasiswa memahami pengertian uang;
- c) Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme uang.

### **3. Materi Pembelajaran**

#### **1) Pengertian Uang**

Apa yang dimaksud dengan uang? Dalam kehidupan sehari-hari, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang disetujui dan diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Berdasarkan definisi tersebut, uang dapat berupa barang yakni pada sistem pertukaran barter. Sejarah uang memang dimulai dengan barter, kemudian uang komoditi dan dalam perkembangannya kebanyakan alat transaksi dilakukan dengan menggunakan uang kertas, cek bahkan sampai uang plastik.

Dalam ilmu ekonomi tradisional uang dapat didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sedangkan uang dalam ilmu ekonomi modern, yang didefinisikan oleh beberapa ahli dalam Raharjo (2009):

1. AC Pigou dalam bukunya *The Veil of Money* pada tahun 1950-an mengatakan bahwa uang segala sesuatu yang dipergunakan sebagai alat tukar;
2. DH Robertson dalam bukunya *Money* 1922 mengatakan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang;
3. RG Thomas dalam bukunya *Our Modern Banking*, mengatakan bahwa uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang;
4. RS. Sayers dalam bukunya *Modern Banking* 1938 mengatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang diterima sebagai pembayar utang;

5. Albert Gailorrt Hart dalam bukunya *Money Debt and Economic Activity* pada tahun 1950-an mengatakan bahwa uang adalah kekayaan di mana si pemilik dapat melunaskan utangnya dalam jumlah tertentu pada waktu itu juga;
6. Rollin G. Thomas dalam bukunya *Our Modern Banking and Monetary System 1957* mengatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan biasanya diterima umum dalam pembayaran pembelian barang-barang, jasa-jasa dan pembayaran utang.

Sebagai alat pertukaran, maka keberadaan uang menjadi sangat penting dalam perekonomian. Suatu benda dapat dijadikan sebagai "uang" jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Beberapa syarat-syarat uang antara lain:

1. Diterima secara umum (*acceptability*). Uang harus dapat diterima oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa.
2. Memiliki nilai yang cenderung stabil (*stability of value*). Nilai uang seharusnya stabil, tidak berfluktuasi dari waktu ke waktu.
3. Ringan dan mudah dibawa (*portability*). Keberadaan uang seharusnya tidak memberatkan pemilikinya dan mudah dibawa ke mana-mana dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*).
4. Tahan lama (*durability*). Uang harus memiliki sifat tahan lama dan tidak mudah rusak, oleh karena itu pemilihan bahan sangat menentukan ketahanan uang.
5. Kualitasnya cenderung sama (*uniformity*). Uang harus memiliki kualitas yang cenderung sama.

## **2) Fungsi Dan Tujuan Memegang Uang**

Uang mulai banyak digunakan dalam masyarakat. Penggunaan uang oleh masyarakat karena uang memiliki empat fungsi:

1. Uang sebagai alat tukar-menukar (*medium of exchange*). Dalam sistem pertukaran barter, uang mensyaratkan adanya *double coincidence*. Dengan adanya "uang" yang diterima secara umum sebagai alat tukar, maka syarat *double coincidence* tersebut menjadi tidak relevan lagi.

2. Uang sebagai satuan nilai (*measure of value*). Dalam fungsinya uang sebagai satuan pengukur nilai, maka setiap barang yang dipertukarkan dapat dinilai dengan satuan uang tertentu. Uang dipakai untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang/jasa. Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran barang.
3. Uang sebagai standar atau ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deferred payments*).
4. Uang sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan (*store of value and store of wealth*). Sebagai penyimpan nilai atau kekayaan, uang digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang.

Berkaitan dengan fungsi-fungsi uang tersebut, maka seseorang yang memegang uang setidaknya dilandasi tiga motif; yaitu:

### 1. Motif Transaksi (*Transaction Motive*)

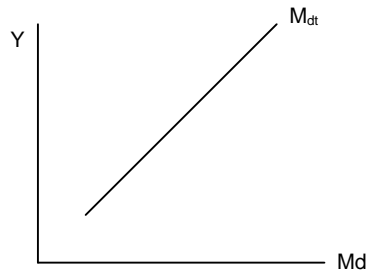
Motif transaksi adalah dorongan orang memegang untuk kebutuhan transaksi atau pembayaran, baik yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen ataupun rumah tangga perusahaan. Bagi rumah tangga konsumen, motif transaksi berkaitan dengan pembayaran pemakaian listrik, telepon dan belanja harian, sedangkan bagi rumah tangga perusahaan motif transaksi berhubungan dengan pengeluaran upah atau gaji karyawan dan pengeluaran-pengeluaran perusahaan lainnya. Motif transaksi ini dipengaruhi oleh besarnya tingkat pendapatan. Secara matematis, permintaan uang untuk tujuan transaksi ( $M_{dt}$ ) dirumuskan sebagai berikut.

□

$$M_{dt} \propto kY$$

di mana  $M_{dt}$  (*money demand for transaction*) merupakan motif memegang uang untuk transaksi dan  $Y$  adalah pendapatan yang diterima.  $Y$  merupakan tingkat pendapatan yang berhubungan positif dengan permintaan uang untuk transaksi.

Semakin tinggi tingkat pendapatan semakin besar keinginan memegang uang kas untuk transaksi. Ketergantungan permintaan uang untuk transaksi terhadap pendapatan dapat dijelaskan dalam Gambar 1.2 berikut ini.



Gambar 1.1

### **Permintaan Uang untuk Transaksi**

Permintaan uang untuk tujuan transaksi ditunjukkan dengan  $M_{dt}$ . Pada motif transaksi, Keynes mengikuti jejak Klasik bahwa permintaan untuk transaksi tergantung pendapatan, namun perbedaannya terletak pada penekanan motif spekulasi dan peranan tingkat bunga dalam menentukan permintaan uang untuk spekulasi.

### **2. Motif Berjaga-jaga (*Precautionary Motive*)**

Sesuai dengan fungsinya sebagai alat tukar, maka tujuan seseorang memegang uang adalah karena kebutuhannya untuk melakukan transaksi. Karena itu, kebutuhan uang untuk transaksi ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Pemikiran ini berlandaskan pada pemikiran Ekonom Klasik, walaupun begitu ekonom penganut Keynes juga tidak menolaknya.

Keynes menganalisis teori permintaan uang Klasik lebih jauh dari sekedar untuk transaksi. Permintaan uang tersebut adalah untuk berjaga-jaga terhadap kebutuhan yang tak terduga (*unexpected need*) (Nelson, 2010). Tersedianya uang di tangan untuk jaga-jaga memberikan rasa aman menghadapi rekening yang tidak terduga (*unexpected bill*) misalnya untuk biaya pengobatan dan perbaikan secara tiba-tiba.

Keynes percaya bahwa jumlah permintaan uang untuk berjaga-jaga pada dasarnya ditentukan oleh tingkat transaksi yang diperkirakan pada masa yang akan datang. Jenis transaksi ini proporsional dengan pendapatan, oleh karena itu Keynes memformulasikan permintaan uang untuk jaga-jaga secara proporsional sama dengan permintaan uang untuk transaksi (Mishkin, 2007).

Menurut Keynes, masyarakat memerlukan uang kas untuk transaksi dan berjaga-jaga, karena:

- a. transaksi pengeluaran sering kali terjadi lebih dahulu daripada penerimaan/pendapatannya;
- b. pengeluaran sering kali tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
- c. penerimaan yang diharapkan tidak jadi diterima;
- d. pengeluaran yang terjadi sangat penting dan menguntungkan untuk dilakukan lebih dahulu.

### **3. Motif untuk Spekulasi (*Speculative Motive*)**

Pemikiran ini murni merupakan ide dari Keynes. Tujuan seseorang memegang uang untuk spekulasi ini sesuai dengan fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan. Dalam hal ini uang dianggap sebagai aset. Permintaan untuk motif spekulasi ini terjadi karena adanya faktor ketidakpastian (*uncertainty*) dan ekspektasi (*expectation*) yang mempengaruhi seseorang dalam memegang uang. Dalam menentukan kebutuhan uang untuk motif spekulasi ini seseorang dipengaruhi oleh ekspektasi penghasilan masa depan dari berbagai bentuk aset yang dimungkinkan untuk dimiliki. Keynes menggunakan tingkat bunga sebagai variabel pengukur ekspektasi penghasilan masa depan sehingga kebutuhan uang untuk tujuan spekulasi ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat bunga.

Menurut Keynes, masyarakat menghendaki jumlah uang kas yang melebihi keperluan transaksi karena keinginan untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk uang kas. Uang kas yang disimpan ini berarti berfungsi sebagai penimbun kekayaan atau *store of value*. Permintaan uang untuk spekulasi dipengaruhi oleh tingkat bunga, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat bunga semakin rendah keinginan masyarakat akan uang kas untuk spekulasi. Ada dua alasan untuk hal ini, *pertama* jika tingkat bunga naik berarti *opportunity cost of holding money* semakin besar sehingga keinginan masyarakat akan uang kas semakin kecil. Sebaliknya semakin rendah tingkat bunga semakin besar keinginan masyarakat untuk menyimpan uang kas. *Kedua*, adanya hipotesa Keynes yang menganggap terjadinya tingkat bunga normal yaitu jika terjadi perubahan, suatu

tingkat bunga diharapkan akan kembali ke tingkat bunga normal. Jika kenyataannya tingkat bunga berada di atas normal maka harapan masyarakat adalah tingkat bunga tidak naik bahkan diperkirakan akan turun ke tingkat bunga normal sehingga harga surat berharga diperkirakan naik (*capital losses*). Akibatnya, jumlah surat berharga bertambah banyak sehingga permintaan uang kas semakin kecil. Sebaliknya jika tingkat bunga di bawah normal, maka masyarakat memperkirakan tingkat bunga akan naik ke tingkat bunga normal. Harga surat berharga turun sehingga masyarakat menjual surat berharganya karena biaya memegang uang kas naik.

### 3) Jenis-jenis Uang

Pada perkembangan perekonomian saat ini sebenarnya yang dimaksud uang bukan dalam arti sempit yaitu uang yang diciptakan oleh bank Indonesia saja, melainkan dalam arti yang lebih luas yang mencakup alat alat likuid lainnya. Jenis-jenis uang tersebut adalah:

1. **Uang Primer.** Uang primer ini juga sering dikenal dengan istilah uang inti (*high powered money*), atau uang dasar (*base money*). Uang primer adalah uang logam, uang kertas maupun cek yang dicetak oleh bank sentral. Dalam sistem moneter Indonesia, uang primer ini terdiri dari: uang kartal, alat likuid bank umum yang terdiri atas kas bank umum dan giro bank umum pada Bank Indonesia, serta giro swasta bukan bank yang ada pada Bank Indonesia.
2. **Full Bodied Money** (uang penuh). Nilai uang dikatakan sebagai *uang penuh* apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Agar nilai uang sama dengan nilai materinya, setidaknya ada 2 syarat yang harus dipenuhi yaitu masyarakat diberikan kebebasan untuk membuat mata uang ke pabrik uang milik pemerintah serta masyarakat bebas untuk menjual, membeli dan menyimpang uang logam yang dimilikinya. Jika kedua syarat tersebut dipenuhi maka nilai uang akan sama dengan nilai materi yang dipergunakannya.
3. **Token Money** (uang tanda). Uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya, untuk membuat uang

Rp1.000,00 pemerintah mengeluarkan biaya Rp750,00. *Token money* adalah mata uang yang nilai nominalnya lebih tinggi dari materinya. Uang kertas dan logam yang beredar sekarang termasuk dalam *token money*.

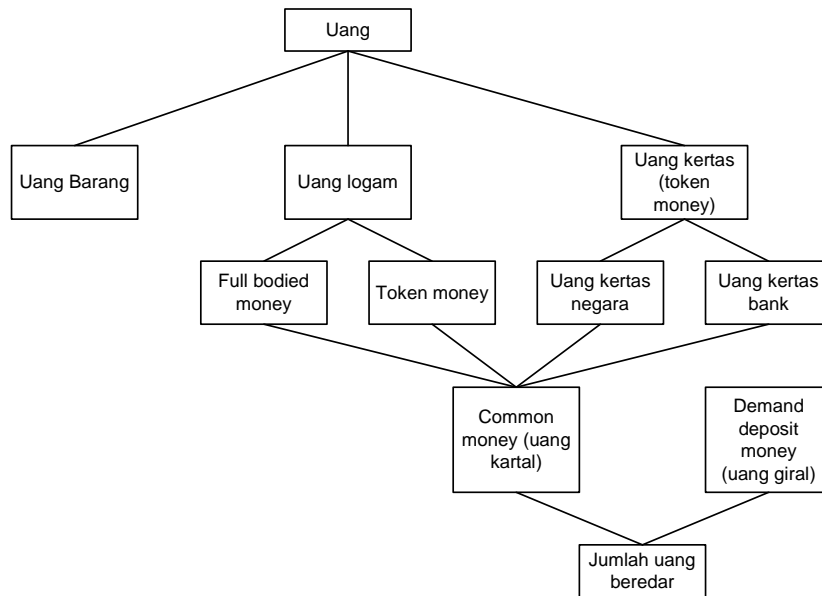
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perbedaan antara *full bodied money* dengan *token money* (Rahardjo, 2009):

- a. Terletak pada definisinya. Bila *token money* merupakan mata uang yang nilai materinya jauh di bawah nilai nominalnya, maka *full bodied money* adalah mata uang yang nilai materinya sama dengan nilai nominalnya.
  - b. Pada masa *token money*, mata uang dibuat oleh badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah misalnya Bank Sentral, sedangkan pada masa *full bodied money*, masyarakat bebas menempa dan melebur mata uang sendiri.
  - c. Pada masa *full bodied money*, jumlah uang beredar sulit dihitung jumlahnya sedangkan pada masa *token money* jumlah uang beredar mudah dihitung.
4. **Uang Kertas.** Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas). Ada beberapa pertimbangan mengapa kertas dipilih sebagai bahan untuk membuat uang yaitu : (1) Kertas sifatnya lebih ringan dan mudah dibawa ke mana-mana; (2) biaya pembuatan uang kertas relatif murah dibandingkan ongkos pembuatan uang logam; (3) persediaan kertas yang dimiliki pemerintah relatif banyak sehingga jika sewaktu waktu pemerintah ingin menambah jumlah uang kertas tidak kesulitan mendapatkan bahan baku. Uang kertas juga disebut sebagai *folding money* karena uang kertas dapat dilipat. Nilai uang kertas dijamin oleh pemerintah sehingga tidak menimbulkan keraguan orang untuk menggunakan uang kertas. Atas dasar kepercayaan tersebut maka uang kertas sering disebut uang fiat atau uang kepercayaan. Di Indonesia, bank Indonesia diberikan hak untuk mencetak dan mengelola keberadaan uang kertas.
5. **Uang Giral.** Uang giral adalah uang yang diciptakan oleh bank-bank umum. Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar

yang lebih mudah, praktis dan aman. Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang giral adalah bank umum selain Bank Indonesia. Menurut UU No. 7 tentang Perbankan tahun 1992, definisi uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Dalam sistem moneter Indonesia, uang giral terdiri dari rekening giro, kiriman uang, simpanan berjangka dan tabungan rupiah yang sudah jatuh waktu, yang seluruhnya merupakan simpanan penduduk dalam Rupiah. Uang giral biasanya digunakan untuk transaksi dengan nilai uang yang sangat besar.

6. **Uang Kuasi** (*Quasi Money*). Uang kuasi mempunyai kemiripan dengan uang. Uang kuasi merupakan bentuk kekayaan yang dianggap cukup likuid, dalam waktu dekat dapat diuangkan di bank. Beberapa contoh uang kuasi antara lain deposito berjangka, tabungan, dan obligasi pemerintah. Sebuah paham yang berpandangan luas (Komite Radcliffe) menyatakan bahwa yang termasuk uang adalah terdiri dari uang kartal, uang giral dan kuasi, sedangkan paham yang berpandangan sempit menyatakan bahwa uang itu hanya terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang kartal dan uang giral yang ada di masyarakat lazimnya disebut jumlah uang beredar (Rahardjo, 2009). Dalam sistem moneter Indonesia, uang kuasi terdiri dari simpanan berjangka dan tabungan penduduk baik dalam Rupiah maupun valuta asing.

Jumlah uang yang beredar di masyarakat pada dasarnya terdiri dari uang kartal dan uang giral. Untuk lebih jelasnya coba Anda perhatikan Gambar 1.3. tentang jenis-jenis Pada Gambar 1.3 diketahui bahwa pembagian jenis uang didasarkan pada bahan yang digunakannya maka uang dibagi menjadi uang barang, uang logam dan uang kertas. Uang logam sendiri dibagi menjadi *full bodied money* dan *token money*, sedangkan uang kertas yang terdiri dari uang kertas negara dan uang kertas bank seluruhnya merupakan *token money*. Dari pembagian ini kemudian timbul uang kartal yang terdiri dari turunan uang logam dan uang kertas. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Di Indonesia, lembaga yang bertugas dan mengawasi peredaran uang rupiah adalah Bank Indonesia, sedangkan perusahaan yang mencetak uang rupiah adalah Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).



Gambar 1.2

### **Jumlah Uang Beredar di Masyarakat**

Jumlah uang beredar yang terdiri dari uang kartal dan uang giral sering disebut sebagai *narrow money* atau  $M_1$ , sedangkan  $M_2$  (*broad money*) cakupannya lebih luas yaitu merupakan  $M_1$  ditambah deposito dan tabungan dalam mata uang domestik. Pengertian yang lebih luas lagi yaitu  $M_3$  yaitu  $M_2$  ditambah deposito berjangka dalam mata uang asing.  $M_1$  merupakan jumlah uang beredar yang paling likuid, sebab proses untuk menjadikannya sebagai uang kas sangat cepat dan tanpa adanya kerugian nilai (artinya satu rupiah menjadi satu rupiah juga). Sementara  $M_2$  karena mencakup deposito berjangka maka likuiditasnya lebih rendah, untuk menjadikannya uang kas, deposito berjangka perlu waktu (3, 6, atau 12 bulan) sehingga jika dijadikan uang kas sebelum jangka waktu tersebut kena penalti/denda (jadi tidak satu rupiah menjadi satu rupiah, tetapi lebih kecil karena denda tersebut).

### **Peran Bank Sentral**

Sejalan dengan perkembangan dan evolusi peran bank sentral dalam perekonomian suatu negara/kawasan, tugas yang diemban oleh bank sentral juga mengalami tahapan evolusi sesuai dengan tuntutan dan mandat yang diberikan kepada bank sentral. Sebagaimana diketahui, mandat pertama yang diberikan kepada bank sentral adalah dalam hal pagedaran uang. Bank Sentral

diberikan hak monopoli/kewenangan tunggal untuk mencetak dan mengedarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Tugas ini dikenal sebagai tugas dalam mengatur dan memelihara sistem pembayaran. Dengan semakin berkembangnya perdagangan antar negara, bank sentral kemudian diberi mandat untuk memelihara kestabilan nilai uang yang diedarkan. Tugas ini selanjutnya lebih dikenal sebagai tugas di bidang moneter. Selanjutnya sejalan dengan peran bank sentral sebagai pelaksana lender of the last resort, bank sentral juga diberi mandat untuk mengatur dan mengawasi bank komersial. Tugas bank sentral sebagai the lender of the last resort adalah memberikan injeksi likuiditas pada bank atau lembaga keuangan yang mengalami kesulitan dana. Pada tahap selanjutnya, secara perlahan bank sentral mulai meninggalkan peran sebagai bank komersial.

Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menghindari konflik kepentingan antara sesama bank komersial. Di samping itu juga sebagai salah satu konsekuensi dari peran bank sentral sebagai penjaga kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam melaksanakan tugas sebagai the lender of the last resort, bank sentral memerlukan informasi yang lengkap perihal kondisi bank yang akan diberi pinjaman. Untuk itu, bank sentral perlu memiliki hubungan yang lebih dekat dengan bank secara individual. Dengan kondisi yang demikian pada akhirnya ada bank sentral yang diberi tugas untuk mengatur dan mengawasi bank. Namun demikian tidak semua bank sentral yang diberi mandat untuk mengatur dan mengawasi bank. Bank sentral yang tidak mendapat mandat untuk mengatur dan mengawasi bank adalah bank sentral di negara-negara Skandinavia, seperti Finlandia, Denmark, Swedia, Norwegia, dan negaranegara Amerika Latin seperti Chile, Meksiko, dan Peru. Apabila bank sentral tidak diberi tugas mengawasi bank, maka tugas pengaturan dan pengawasan bank dilakukan oleh lembaga lain yang khusus didirikan untuk tugas tersebut. Kedudukannya dapat berada di dalam pemerintah seperti di bawah menteri keuangan atau juga dapat dilakukan oleh lembaga khusus yang terpisah dari pemerintah. Adakalanya bank sentral juga didirikan dan diberi tugas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari berbagai tugas bank sentral yang disebutkan di atas, sebenarnya terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh bank sentral.

Menurut Chandavarkar (1996), tujuan dari kebijakan bank sentral pada dasarnya dapat terdiri dari menjaga kestabilan harga, nilai tukar, kesinambungan neraca pembayaran, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, full employment dan kesejahteraan umum. Dari

pendapat tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa bank sentral pada perkembangannya memiliki multiple objectives atau tujuan yang jamak. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan dinamika faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas bank sentral, pada akhir abad 20 dan awal abad 21, cukup banyak bank sentral yang merevisi tujuannya, dari multiple objectives, seperti meningkatkan kapasitas output perekonomian, memperluas kesempatan kerja, menjaga kestabilan nilai mata uang negara, disesuaikan menjadi single objectives yaitu mencapai dan memelihara kestabilan harga.

#### **4. Tugas/Latihan**

Apa yang dimaksud dengan uang?

#### **5. Evaluasi**

Jelaskan jenis-jenis uang yang sering digunakan masyarakat dalam bertransaksi?

### **C. Kegiatan Pembelajaran 3**

#### **1. Materi Pembelajaran : Kebijakan Moneter Dalam Kebijakan Kurs**

#### **2. Tujuan Pembelajaran**

Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini sebagai berikut:

- a) Mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan moneter
- b) Mahasiswa mampu memahami kebijakan kurs

#### **3. Materi Pembelajaran**

##### **Pengertian Kebijakan Moneter**

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar

valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

### **Jenis Kebijakan Moneter**

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- ✓ Kebijakan moneter ekspansif (Monetary expansive policy)  
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (easy money policy)
- ✓ Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary contractive policy)  
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

- Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)  
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

➤ Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadangkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

➤ Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

➤ Imbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

## **Kebijakan Kurs**

Nilai tukar (atau dikenal sebagai kurs) adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau di kemudian hari, antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah. Dalam sistem pertukaran dinyatakan oleh yang pernyataan besaran jumlah unit yaitu "mata uang" (atau "harga mata uang" atau "sarian mata uang") yang dapat dibeli dari 1 penggalan "unit mata uang" (disebut pula sebagai "dasar mata uang"). sebagai contoh, dalam penggalan disebutkan bahwa kurs EUR-USD adalah 1,4320 (1,4320 USD per EUR) yang berarti bahwa penggalan mata uang adalah dalam USD dengan penggunaan penggalan nilai dasar tukar mata uang adalah EUR.

Sistem nilai tukar mata uang bebas-apung merupakan nilai tukar yang dibolehkan untuk berbeda terhadap yang lain dan mata uang ditentukan berdasarkan kekuatan-kekuatan pasar atas dari penawaran dan permintaan nilai tukar mata uang akan cenderung berubah hampir selalu seperti yang akan dikutip pada papan pasar keuangan, terutama oleh bank-bank di seluruh dunia sedangkan dalam penggunaan sistem pasak nilai tukar mata uang atau merupakan nilai tukar tetap dengan ketentuan berlakunya devaluasi dari nilai mata uang berdasarkan sistem Bretton Woods.

### **Kebijakan Moneter**

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaransasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

#### **4. Tugas/Latihan**

Jelaskan apa yang dimaksud kebijakan moneter ?

#### **5. Evaluasi**

Sebutkan instrument kebijakan moneter ?

#### **D. Kegiatan Pembelajaran 4**

##### **1. Materi Pembelajaran : Bank Sentral Dan Kebijakan Moneter**

##### **2. Tujuan Pembelajaran**

Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini sebagai berikut:

- a) Mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan moneter
- b) Mahasiswa mampu memahami peran bank sentral pada kebijakan moneter

##### **3. Materi Pembelajaran**

###### **Prinsip Bank Sentral Pada Kebijakan Moneter**

Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang Undang Bank Indonesia.

Dalam menjalankan mandat tersebut, Bank Indonesia mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen. Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. Kemudian prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa Bank Indonesia tidak menginginkan adanya praktik monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. Terakhir adalah kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen.

Sementara itu dalam kaitannya sebagai lembaga yang melakukan pagedaran uang, kelancaran sistem pembayaran diejawantahkan dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat dan dalam kondisi yang layak edar atau biasa disebut clean money policy. Secara garis besar Sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu Sistem pembayaran tunai dan Sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar dari kedua jenis

sistem pembayaran tersebut terletak pada instrumen yang digunakan. Pada sistem pembayaran tunai instrumen yang digunakan berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam, sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai instrumen yang digunakan berupa Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik.

#### **4. Tugas/Latihan**

Jelaskan apa yang dilakukan Bank Sentral pada kebijakan moneter ?

#### **5. Evaluasi**

Jelaskan aturan Bank Sentral terkait kebijakan moneter ?

## **E. Kegiatan Pembelajaran 5**

### **1. Materi Pembelajaran : Strategi Kebijakan Moneter Bagi Stabilitas Negara**

### **2. Tujuan Pembelajaran :**

Adapun tujuan dari pembelajaran materi ini sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa memahami kebijakan moneter;
- 2) Mahasiswa memahami strategi stabilitas negara.

### **3. Materi Pembelajaran**

#### **Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi**

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator.

Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya:

- ✓ Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI), adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
- ✓ Indeks biaya hidup atau cost-of-living index (COLI).
- ✓ Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK pada masa depan karena perubahan

harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.

- ✓ Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
- ✓ Indeks harga barang-barang modal
- ✓ Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.

### **Strategi Kebijakan Moneter**

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

#### **Kebijakan moneter ekspansif (Monetary expansive policy)**

Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (easy money policy)

#### **Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary contractive policy)**

Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

- ✓ Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)  
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka

pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

✓ Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadangkala mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

✓ Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

✓ Imbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

#### **4. Tugas/Latihan**

Sebutkan strategi kebijakan moneter ?

#### **5. Evaluasi**

Jelaskan kaitan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi ?

## **F. Kegiatan Pembelajaran 6**

### **1. Materi Pembelajaran : Strategi Kebijakan Moneter**

### **2. Tujuan Pembelajaran**

Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini sebagai berikut:

- a) Mahasiswa memahami strategi kebijakan moneter;
- b) Mahasiswa memahami kebijakan yang tepat mengatasi moneter.

### **3. Materi Pembelajaran**

#### **Kerangka Umum Kebijakan Moneter**

Seiring dengan semakin besarnya peran sistem keuangan dalam perekonomian, dampak ketidakstabilan sistem keuangan menjadi semakin signifikan. Hal ini tercermin pada besarnya biaya penyelamatan dan juga beratnya dampak yang ditimbulkan oleh krisis keuangan global tahun 2008/2009, sehingga menyadarkan pentingnya peran bank sentral untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan.

Strategi kebijakan moneter pasca krisis keuangan global 2008/2009, bank sentral dituntut untuk semakin memperkuat stabilitas sistem keuangan untuk memastikan perekonomian dan sistem keuangan berada dalam kondisi stabil, baik dari sisi makroekonomi maupun sektor keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF menjadi flexible ITF dengan semakin memperkuat mandatnya dalam kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.

Dengan telah dilepaskannya sistem nilai tukar dengan band intervensi nilai tukar (crawling band) di tahun 1997, Bank Indonesia memerlukan jangkar nominal (nominal anchor) baru dalam rangka menjalankan kebijakan moneter. Jangkar nominal adalah variabel nominal (seperti indeks harga, nilai tukar, atau uang beredar) yang ditargetkan secara eksplisit oleh bank sentral sebagai dasar/patokan bagi pembentukan harga lainnya. Misalnya kalau nilai tukar dijadikan target, maka inflasi luar negeri akan menjadi inflasi domestik.

Mengapa kebijakan moneter memerlukan jangkar nominal? Karena tanpa adanya jangkar nominal, tidak ada kejelasan kemana kebijakan moneter akan diarahkan sehingga masyarakat tidak memiliki pedoman dalam membuat ekspektasi inflasi. Ibarat kapal yang mengapung di lautan tanpa kejelasan kearah mana kapal dilabuhkan. Sebaliknya, dengan adanya jangkar nominal masyarakat akan membuat ekspektasi inflasi yang diperlukan dalam kalkulasi usahanya sesuai dengan jangkar nominal tersebut. Dengan mengumumkan sasaran inflasi dan Bank Indonesia secara konsisten dapat mencapainya akan meningkatkan kredibilitas kebijakan moneter yang pada gilirannya ekspektasi inflasi masyarakat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan BI.

Ada sejumlah alasan mengapa menggunakan jangkar nominal dengan ITF. ITF lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan sasaran inflasi secara eksplisit masyarakat akan memahami arah inflasi. Sebaliknya dengan sasaran base money, apalagi jika hubungannya dengan inflasi tidak jelas, masyarakat lebih sulit mengetahui arah inflasi kedepan. ITF yang memfokuskan pada inflasi sebagai prioritas kebijakan moneter sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Bank Indonesia. ITF bersifat forward looking sesuai dengan dampak kebijakan pada inflasi yang memerlukan time lag. ITF meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan moneter mendorong kredibilitas kebijakan moneter. Aspek transparansi dan akuntabilitas serta kejelasan akan tujuan ini merupakan aspek-aspek good governance dari sebuah bank yang telah diberikan independensi. ITF tidak memerlukan asumsi kestabilan hubungan antara uang beredar, output dan inflasi. Sebaliknya, ITF merupakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan sejumlah variabel informasi tentang kondisi perekonomian.

Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework (ITF) dengan penggunaan suku bunga sebagai sasaran operasional. Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak 1 Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer (base money) sebagai sasaran kebijakan moneter. Berpijak pada pengalaman krisis keuangan global 2008/2009, salah satu pelajaran penting yang mengemuka adalah diperlukannya fleksibilitas yang cukup bagi bank sentral untuk merespons perkembangan ekonomi yang semakin kompleks dan peran sektor keuangan yang semakin kuat dalam

memengaruhi stabilitas ekonomi makro. Berdasarkan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF menjadi Flexible ITF.

Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008/2009 mengharuskan bank sentral untuk melakukan stabilitas sistem keuangan dan penyelamatan perekonomian. Kebijakan yang hanya mengedepankan penerapan ITF menunjukkan kelemahan. Hal ini dikarenakan penerapan ITF secara ketat yang hanya fokus pada mandat kebijakan moneter untuk menjaga inflasi sesuai dengan targetnya tidak cukup untuk menjaga stabilitas sistem perekonomian secara keseluruhan.

#### **4. Tugas/Latihan**

Setiap mahasiswa mencari sejarah Krisis moneter ?

#### **5. Evaluasi**

Kemudian dari krisis yang terjadi analisa penyebab terjadi dan penyelesaiannya ?

## **G. Kegiatan Pembelajaran 7**

### **1. Materi Pembelajaran : Proses Penciptaan Uang Beredar**

### **2. Tujuan Pembelajaran :**

Adapun tujuan dari materi ini sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa memahami proses penciptaan uang dan peredaran uang

### **3. Materi Pembelajaran**

#### **Jumlah Uang Beredar**

Pasar uang, sebagaimana pasar yang lain selalu mempunyai dan mencakup tiga unsur pasar yakni penawaran, permintaan dan interaksi keduanya dalam membentuk harga dan jumlah keseimbangan. Penawaran uang ini dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah jumlah uang beredar (JUB). Siapakah pelaku-pelaku di pasar uang tersebut, dan apa yang dimaksud dengan harga uang tadi.

Para pelaku di sisi penawaran adalah lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menciptakan dan mempengaruhi jumlah uang beredar. Lembaga-lembaga tersebut adalah Bank Sentral dan Lembaga Keuangan yang menurut undang-undang diperbolehkan mencetak dan mengedarkan uang. Di Indonesia, lembaga-lembaga tersebut adalah Bank Indonesia dan Bank-bank Umum Pencipta Uang Giral (BPUG). Para pelaku di sisi permintaan adalah masyarakat pengguna uang, baik orang per orang ataupun badan hukum. Tingkat bunga adalah harga yang harus dibayar atas pinjaman uang. Jadi, harga uang di pasar uang adalah tingkat bunga. Pandangan ini merupakan pandangan dari Teori Keynes dan para pengikut pemikirannya. Sementara pandangan yang berangkat dari Teori Klasik, harga uang adalah tingkat harga umum. Karena itu, interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar uang akan menentukan tingkat harga umum.

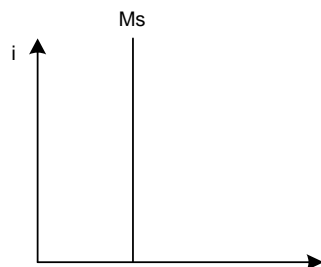
Penawaran uang di pasar uang ditunjukkan oleh banyaknya jumlah uang beredar, yang terdiri dari uang dalam arti sempit dan uang dalam arti luas (bahkan di beberapa negara sudah membedakannya ke dalam tiga macam uang beredar). Bank Indonesia masih menggunakan dua konsep uang tersebut.

1. Jumlah uang beredar dalam arti sempit (*narrow money*). Salah satu konsep uang yang penting dan banyak dikenal adalah pengertian uang dalam arti sempit. Uang dalam arti sempit ini terdiri dari uang kartal dan giral. Uang dalam arti sempit dinyatakan dengan simbol  $M_1$ .
2. Jumlah uang beredar dalam arti luas (*broad money*). Uang dalam arti luas terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Uang dalam arti luas tersebut dinyatakan dengan simbol  $M_2$ .

### **Proses Penciptaan Uang Beredar**

Bagaimanakah proses penciptaan uang beredar? Ada dua pandangan yang berbeda dalam hal pencetakan uang beredar. Pandangan *pertama*, berpendapat bahwa uang beredar sepenuhnya ditentukan oleh Otoritas Moneter atau Bank Sentral. Sedang pandangan *kedua* berpendapat bahwa selain Otoritas Moneter, lembaga lain seperti bank umum dan perilaku masyarakat ikut menentukan besarnya jumlah uang beredar.

Menurut pandangan pertama, jumlah uang beredar (JUB) sepenuhnya ditentukan oleh Otoritas Moneter. Hal ini berarti bahwa jumlah uang beredar bersifat otonom, yang tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga pasar uang. Di Indonesia, jumlah uang beredar menurut pandangan ini ditunjukkan oleh jumlah uang primer. Walaupun besarnya jumlah uang primer ini tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga ( $i$ ) pasar uang, akan tetapi jumlah uang primer tersebut dipengaruhi oleh kebijakan Otoritas Moneter dalam menentukan instrumen-instrumen "Bank Indonesia *Rate/BI Rate*" yang akan menjadi sinyal suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan besarnya Giro Wajib Minimum (*minimum reserve requirement*; GWM) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Karena besarnya jumlah uang beredar ditentukan secara otonom oleh Otoritas Moneter, maka bentuk kurva penawaran uang ( $M_s$ ) adalah vertikal, coba Anda perhatikan Gambar 1.3.



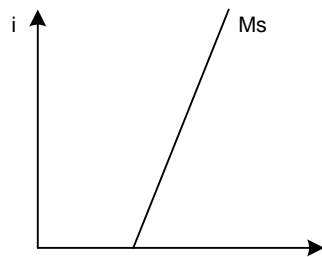
Gambar 1.3

### Jumlah Uang Beredar ditentukan Otoritas Moneter

Keterangan:  $i$  = tingkat bunga

$M_s$  = jumlah uang beredar

Menurut pandangan kedua jumlah uang beredar bukan hanya ditentukan oleh Otoritas Moneter melainkan juga oleh kebijakan bank-bank umum. Dengan demikian, yang mempengaruhi jumlah uang beredar selain dipengaruhi oleh instrumen-instrumen yang bersifat otonom yang dilakukan Otoritas Moneter, juga dipengaruhi oleh kebijakan bank umum dalam menentukan tingkat bunga pasar uang.



Gambar 1.4

### Jumlah Uang Beredar Ditentukan oleh Otoritas Moneter dan Bank Umum

Di Indonesia, jumlah uang beredar yang dipengaruhi oleh bank umum tersebut ditunjukkan oleh jumlah uang giral dan uang kuasi. Jumlah uang giral maupun uang kuasi ini dipengaruhi oleh tingkat bunga. Perilaku tingkat bunga pasar ini juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam menyimpan atau meminjam uang di pasar uang. Oleh karena itu, jumlah uang beredar menurut pandangan kedua ini kurva penawaran berbentuk miring dari kiri bawah ke kanan atas atau mempunyai kemiringan positif. Silakan Anda perhatikan Gambar 1.4

#### **4. Tugas/Latihan**

Setiap mahasiswa membuat kesimpulan tentang proses penciptaan uang beredar ?

#### **5. Evaluasi**

Selanjutnya mahasiswa mencari jurnal tentang peredaran uang dan rangkumkan ?

## **H. Kegiatan pembelajaran 9**

### **1. Materi Pembelajaran : Proses Penawaran Uang Dan Manajemen Moneter**

### **2. Tujuan Pembelajaran :**

Adapun tujuan dari materi pembelajaran ini sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa mampu memahami proses penawaran uang;
- 2) Mahasiswa memahami manajemen moneter.

### **3. Materi Pembelajaran**

#### **Proses Penawaran Uang**

Uang adalah segala sesuatu yang dapat dipakai dan diterima umum untuk melakukan berbagai macam transaksi ekonomi/pembayaran seperti pembelian barang dan jasa, pelunasan hutang, investasi, dan sebagainya. Pembahasan umum yang terkait dengan teori uang dalam ilmu ekonomi moneter biasanya mengenai dengan teori permintaan uang dan teori penawaran uang.

Secara definisi, penawaran uang merupakan jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian atau jumlah uang yang beredar (JUB) di masyarakat. Konsep penawaran uang terkait dengan kebijakan moneter yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Dengan demikian penawaran uang dikendalikan sepenuhnya oleh bank sentral. Perubahan jumlah uang yang beredar secara garis besar dipengaruhi oleh uang inti dan pelipat uang (multiplier). Besarnya uang inti sangat tergantung pada kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh bank sentral. Pelipat uang, selain dipengaruhi oleh perilaku bank sentral juga ditentukan oleh perilaku agen-agen ekonomi lainnya seperti bank umum dan masyarakat domestik.

Konsep uang sangat terkait pada konsep likuiditas. Suatu aset dikatakan likuid jika aset tersebut dengan mudah diuangkan tanpa kehilangan risiko rugi. Pada satu sisi ekstrim dari spektrum likuiditas, uang tunai adalah aset yang paling likuid dengan daya beli penuh. Pada tingkat spektrum likuiditas moderat terdapat uang kuasi yang secara definitif tidak secara langsung berfungsi sebagai medium of exchange. Pada sisi ekstrim lainnya terdapat

aset-aset fisik yang sangat tidak likuid sebagai alat pertukaran seperti rumah, tanah, obligasi jangka panjang dan sebagainya

### **Instrumen Tidak Langsung Dan Proses Penawaran Uang**

Banyak faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran uang, antara lain tingkat bunga, tingkat inflasi, pendapatan nasional serta nilai tukar.

➤ **Tingkat bunga.**

Bunga merupakan imbal jasa atas pinjaman uang. Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat kedepan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa (bunga) dalam suatu periode tertentu disebut suku bunga. Suku bunga tetap adalah suku bunga pinjaman yang tidak berubah sepanjang masa kredit. Suku bunga mengambang adalah suku bunga yang berubah-ubah selama masa kredit berlangsung dengan mengikuti suatu kurs referensi tertentu seperti misalnya LIBOR dimana cara perhitungannya dengan menggunakan sistem penambahan marjin terhadap kurs referensi. Tingkat bunga merupakan faktor utama yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Tingginya tingkat bunga menyebabkan biaya produksi meningkat yang pada gilirannya menyebabkan dunia usaha menjadi lesu.

➤ **Tingkat inflasi.**

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/alat tukar) dan yang kedua adalah tekanan produksi dan atau distribusi. Inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation) lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral. Inflasi ini terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan yang biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total

sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment dimana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan. Sementara itu inflasi tekanan produksi (cost push inflation ) diakibatkan kurangnya produksi dan keterbatasan distribusi. Inflasi ini dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh pemerintah seperti fiskal, perpajakan, kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dan lain sebagainya. Inflasi ini terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walaupun permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidaklancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru.

➤ Pendapatan Nasional.

Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektorsektor ekonomi pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Konsumsi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pendapatan nasional. Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan pendapatan nasional, yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi

akan menurunkan pendapatan nasional dan menambah pengangguran. Bila pendapatan nasional rendah, pemerintah mungkin akan memperbanyak jumlah uang yang beredar dengan tujuan untuk menggairahkan dunia perbankan dan dunia usaha (melalui peningkatan suku bunga dan peningkatan harga).

➤ Nilai tukar rupiah.

Jika nilai tukar rupiah menurun, pemerintah akan menurunkan jumlah rupiah yang beredar, sehingga sesuai hukum keseimbangan permintaan dan penawaran. Tingkat bunga akan naik dan nilai rupiah pun terangkat. Nilai tukar yang berdasarkan pada kekuatan pasar akan selalu berubah disetiap kali nilai-nilai salah satu dari dua komponen mata uang berubah. Sebuah mata uang akan cenderung menjadi lebih berharga bila permintaan menjadi lebih besar dari pasokan yang tersedia. Nilai akan menjadi berkurang bila permintaan kurang dari penawaran yang tersedia. Peningkatan permintaan terhadap mata uang adalah yang terbaik karena dengan meningkatnya permintaan untuk transaksi uang, atau mungkin adanya peningkatan permintaan uang yang spekulatif.

#### **4. Tugas/Latihan**

Setiap mahasiswa menjelaskan proses penawaran uang ?

#### **5. Evaluasi**

Setiap mahasiswa menjelaskan instrument tidak langsung dalam proses penawaran uang ?

## **I. Kegiatan Pembelajaran 10**

### **1. Materi Pembelajaran : Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Dan Permintaan Uang**

#### **2. Tujuan Pembelajaran :**

Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa mampu memahami transmisi kebijakan moneter
- 2) Mahasiswa mampu memahami mekanisme permintaan uang

#### **3. Materi Pembelajaran**

##### **Mekanisme Klasik VS Keynesian**

Dasar bagi ekonomi klasik membentuk karya Adam Smith dalam *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, yang diterbitkan pada tahun 1776. Smith mengkritik merkantilisme, menganjurkan suatu sistem perdagangan bebas dengan pembagian kerja. Dia menduga sebuah "Tangan Tak Terlihat" yang meregulasi sistem ekonomi terdiri dari aktor-aktor hanya dipandu oleh kepentingan pribadi. Karl Marx mengembangkan teori ekonomi alternatif, yang disebut ekonomi Marxis. Ekonomi Marxis didasarkan pada teori nilai kerja dan mengasumsikan nilai suatu barang berdasarkan pada jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Berdasarkan asumsi ini, kapitalisme didasarkan pada para majikan tidak membayar dengan penuh nilai dari pekerja buruh mereka untuk menciptakan keuntungan. Mazhab Austria menanggapi ekonomi Marxis dengan melihat kewirausahaan sebagai kekuatan pendorong pembangunan ekonomi. Ini menggantikan teori nilai kerja dengan sistem penawaran dan permintaan.

Pada tahun 1920-an, John Maynard Keynes mendorong pembagian antara mikroekonomi dan makroekonomi. Dalam ekonomi Keynesian tren makroekonomi dapat membanjiri pilihan ekonomi yang dibuat oleh individu. Pemerintah harus mempromosikan permintaan agregasi untuk barang sebagai sarana untuk mendorong ekspansi ekonomi. Setelah Perang Dunia II, Milton Friedman menciptakan konsep moneterisme. Moneterisme berfokus pada penggunaan penawaran dan permintaan uang sebagai metode untuk mengendalikan kegiatan ekonomi. Pada tahun 1970-an, moneterisme telah diadaptasi menjadi ekonomi sisi-penawaran yang menganjurkan

pengurangan pajak sebagai sarana untuk meningkatkan jumlah uang yang tersedia untuk ekspansi ekonomi.

Aliran pemikiran ekonomi modern lainnya adalah ekonomi Klasik Baru dan ekonomi Keynesian Baru. Ekonomi klasik baru dikembangkan pada tahun 1970an, menekankan ekonomi mikro yang solid sebagai dasar untuk pertumbuhan ekonomi makro. Ekonomi Keynesian Baru diciptakan sebagian sebagai tanggapan terhadap ekonomi Klasik Baru, dan berhubungan dengan bagaimana ketidakefisiensian di pasar menciptakan kebutuhan untuk kontrol oleh bank sentral atau pemerintah.

"Sejarah ekonomi" di atas mencerminkan buku teks ekonomi modern dan ini berarti bahwa tahap terakhir dari ilmu direpresentasikan sebagai puncak dari sejarahnya sendiri (Kuhn, 1962). "Tangan tak terlihat" yang disebutkan dalam sebuah halaman yang hilang di tengah sebuah bab dalam "Wealth of Nations", tahun 1776, berkembang sebagai pesan utama dari Smith. Hal tersebut mengesampingkan bawah "tangan tak terlihat" hanya bertindak "secara sering" dan bahwa itu adalah "bukan bagian dari niatnya [individu]" karena persaingan mengarah ke harga yang lebih rendah dengan meniru "si pelaku". Bahwa "tangan tak terlihat" lebih memilih "dukungan dari dalam negeri ke industri asing" dibersihkan terkadang tanpa indikasi bahwa bagian dari kutipan dipotong. Bagian pembukaan dari "Wealth" yang berisi pesan Smith tidak pernah disebutkan karena tidak dapat diintegrasikan ke dalam teori modern: "Kekayaan" bergantung pada pembagian kerja yang berubah bersamaan dengan volume pasar dan proporsi tenaga kerja produktif sampai yang tidak produktif.

### **Represi Finansial Dan Kebijakan Moneter**

Liberalisasi sektor perbankan nasional "secara masif" dimulai sejak krisis ekonomi tahun 1997/1998. Hal ini ditandai oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. UU ini lalu diperkuat Peraturan Pemerintah No 29/1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Hingga saat ini, kebijakan liberalisasi keuangan telah diadopsi sejumlah negara di Asia Timur. Kecenderungan ini dilatarbelakangi keterlibatan negara-negara Asia Timur dalam forum kerja sama ekonomi internasional, seperti WTO, APEC, dan AEC. Liberalisasi juga dipandang sebagai solusi terhadap krisis ekonomi Asia Timur tahun 1997/1998. Kecenderungan di atas melahirkan tiga

pola pergeseran dalam sistem perbankan Asia Timur, yaitu (1) Perubahan struktur portofolio dari dominasi kredit korporasi ke konsumen dan ritel. (2) Kombinasi antara peranan perbankan swasta dan pemerintah. (3) Semakin besarnya peranan bank asing di Asia Timur (McCaully dan Hobson, 1999). Perubahan di atas melahirkan beberapa isu krusial, seperti ketimpangan alokasi kredit antara kredit konsumsi dan investasi, konsolidasi perbankan yang menggeser kepemilikan bank dari dominasi pemerintah ke swasta, serta kehadiran lembaga keuangan asing dalam industri perbankan nasional. Permasalahannya, liberalisasi keuangan yang dipraktikkan di negara-negara Asia Timur bersifat tak simetris (*asymmetric liberalization*). Ini tecermin pada perbedaan derajat keterbukaan sistem perbankan setiap negara, di mana Indonesia merupakan negara dengan derajat keterbukaan (derajat liberalisasi) paling tinggi. Liberalisasi asimetris

Liberalisasi keuangan merupakan bagian integral dari liberalisasi ekonomi. Liberalisasi keuangan mengurangi secara signifikan peranan pemerintah dalam industri keuangan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan akses pelaku usaha baik domestik maupun asing terhadap industri keuangan sehingga terhindar dari represi finansial (McKinnon, 1973). Pengalaman Brasil menunjukkan, liberalisasi yang ditandai meningkatnya peranan perbankan asing (kantor cabang bank asing ditambah bank lokal milik asing) yang mencapai sekitar 40 persen dari sisi permodalan tak membuat kedalaman sistem keuangannya semakin baik. Rasio kredit perbankan terhadap PDB Brasil baru sekitar 43 persen pada 2009. Demikian juga Indonesia dengan derajat keterbukaan sistem keuangan paling besar memiliki rasio kredit terhadap PDB sekitar 29,62 persen tahun 2011. Hal ini hanya lebih baik dari Laos dan Kamboja yang rasionya 20,4 persen dan 27,6 persen. Indonesia jauh tertinggal dibandingkan Singapura 128,6 persen, Malaysia 117,6 persen, dan Thailand 92,97 persen (MAS, 2012). Fakta ini menunjukkan kehadiran bank asing di Indonesia dan sejumlah negara berkembang lain tak membuat alokasi kredit, khususnya ke sektor produktif, lebih baik. Bank asing, termasuk bank lokal milik asing, hanya ikut bersaing menyalurkan kredit di segmen konsumen dan ritel. Penetrasi perbankan asing juga berdampak pada perubahan porsi kepemilikan bank di Indonesia yang telanjur memberikan peluang bagi pihak asing memiliki 99 persen saham perbankan lokal. Tak bisa dihindari, kurang lebih 55,32 persen aset perbankan nasional dikuasai asing hingga akhir 2011 (IRB, 2012). Bank-

bank asing memiliki kemudahan mengembangkan segmen bisnisnya di Indonesia. Hal ini berimplikasi pada kian ketatnya persaingan antarbank dalam memperebutkan nasabah di daerah perkotaan.

Penyaluran kredit perbankan menjadi semakin terkonsentrasi ke sektor konsumen dan korporasi besar. Perkembangan di Indonesia sangat kontras dengan China di mana empat bank BUMN China menguasai sekitar 60 persen pangsa pasar perbankan nasionalnya. Bahkan, otoritas China secara periodik menginjeksi modal bagi bank pemerintahnya untuk pertahankan pangsa pasar (McCauly dan Hobson, 1999). Mengelola liberalisasi Peranan perbankan asing dalam industri perbankan nasional yang sangat besar tak sejalan dengan kecenderungan di kawasan lain, seperti Asia Pasifik yang porsinya kurang dari 10 persen, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Afrika sekitar 15 persen. Kondisi Indonesia relatif sama dengan Amerika Latin yang porsi bank asingnya mencapai 50 persen. Kehadiran perbankan asing di Indonesia dipicu kemudahan proses perizinan bank dengan prinsip single license.

Bank Asing leluasa membuka kantor cabang dan menempatkan ATM hingga ke daerah. Pada saat yang sama, hampir semua negara anggota ASEAN menerapkan prinsip perizinan bertingkat (multiple license). Tak berlaku asas resiprokal, yaitu kesetaraan perlakuan antara bank asing di Indonesia dan bank lokal di negara asal bank bersangkutan. Idealnya, Indonesia menerapkan pendekatan one on one agreement, yaitu jika perbankan asing membuka satu kantor cabang dan ATM di Indonesia, bank asal Indonesia juga wajib memperoleh perlakuan yang sama dalam membuka kantor cabang dan ATM di negara asal bank asing. Dengan demikian, perubahan UU Perbankan yang sedang dibahas di DPR seharusnya menyentuh beberapa hal pokok: perubahan substansial terkait paradigma kebijakan dari yang sangat liberal (derajat keterbukaan tinggi) jadi sedikit lebih ketat. Misalnya dengan mengurangi porsi asing dalam kepemilikan perbankan nasional dari 99 persen menjadi sekitar 50 persen. Langkah ini sejalan negara lain, seperti Malaysia yang hanya mengizinkan kepemilikan asing 10 persen untuk individu dan 20 persen untuk institusi, Vietnam 30 persen, dan Brasil 50 persen. Bahkan Singapura mewajibkan persetujuan MAS hanya untuk memiliki aset bank lokal di atas 5 persen. Mengatur penetrasi bank asing sehingga bersifat

komplementer dengan arah pengembangan industri perbankan nasional. Misalnya dengan mengarahkan bank asing untuk menutupi kekurangan industri perbankan lokal dalam hal pembiayaan infrastruktur. Pengaturan ini juga akan mengeliminasi contagion effect (efek tular) ketika terjadi krisis di negara asal bank asing. Sebagai langkah pengamanan terhadap perekonomian nasional, perlu pengaturan mengenai larangan kepemilikan tunggal (single ownership), termasuk oleh pihak asing. Tujuannya meningkatkan kontrol terhadap aktivitas perbankan nasional sehingga terhindar dari masalah salah kelola seperti yang terjadi pada periode sebelum krisis ekonomi tahun 1997/1998.

### **Mekanisme Transmisi Umum Kebijakan Moneter**

Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI 7DRR sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Namun jalur atau transmisi dari keputusan BI 7DRR sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut sangat kompleks dan memerlukan waktu (time lag).

Mekanisme bekerjanya perubahan BI 7DRR sampai mempengaruhi inflasi tersebut sering disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme ini menggambarkan tindakan Bank Indonesia melalui perubahan-perubahan instrumen moneter dan target operasionalnya mempengaruhi berbagai variable ekonomi dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi. Mekanisme tersebut terjadi melalui interaksi antara Bank Sentral, perbankan dan sektor keuangan, serta sektor riil. Perubahan BI 7DRR mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur, diantaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi.

Pada jalur suku bunga, perubahan BI 7DRR mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui

penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitas ekonomi. Penurunan suku bunga BI 7DRR menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua akan meningkatkan aktifitas konsumsi dan investasi sehingga aktifitas perekonomian semakin bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga BI 7DRR untuk mengerem aktifitas perekonomian yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi.

Perubahan suku bunga BI 7DRR juga dapat mempengaruhi nilai tukar. Mekanisme ini sering disebut jalur nilai tukar. Kenaikan BI 7DRR, sebagai contoh, akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke dalam instrument-instrumen keuangan di Indonesia seperti SBI karena mereka akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Aliran modal masuk asing ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar Rupiah. Apresiasi Rupiah mengakibatkan harga barang impor lebih murah dan barang ekspor kita di luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif sehingga akan mendorong impor dan mengurangi ekspor. Turunnya net ekspor ini akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kegiatan perekonomian.

Perubahan suku bunga BI 7DRR mempengaruhi perekonomian makro melalui perubahan harga aset. Kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset seperti saham dan obligasi sehingga mengurangi kekayaan individu dan perusahaan yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan investasi.

Dampak perubahan suku bunga kepada kegiatan ekonomi juga mempengaruhi ekspektasi publik akan inflasi (jalur ekspektasi). Penurunan suku bunga yang diperkirakan akan mendorong aktifitas ekonomi dan pada akhirnya inflasi mendorong pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah yang lebih tinggi. Upah ini pada akhirnya akan dibebankan oleh produsen kepada konsumen melalui kenaikan harga.

Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini bekerja memerlukan waktu (time lag). Time lag masing-masing jalur bisa berbeda dengan yang lain. Jalur nilai tukar biasanya bekerja lebih cepat karena dampak perubahan suku bunga kepada nilai tukar bekerja sangat cepat. Kondisi sektor keuangan dan perbankan juga sangat berpengaruh pada kecepatan transmisi kebijakan moneter. Apabila perbankan melihat risiko perekonomian cukup tinggi, respon perbankan terhadap penurunan suku bunga BI 7DRR biasanya sangat lambat. Juga, apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan meningkatnya permintaan kredit belum tentu direspon dengan menaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga belum tentu direspon oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat apabila prospek perekonomian sedang lesu. Kesimpulannya, kondisi sektor keuangan, perbankan, dan kondisi sektor riil sangat berperan dalam menentukan efektif atau tidaknya proses transmisi kebijakan moneter.

#### **4. Tugas/Latihan**

Setiap mahasiswa mencari apa yang dimaksud 7DRR ?

#### **5. Evaluasi**

Setiap mahasiswa mencari artikel di jurnal nasional tentang 7DRR ?

## **J. Kegiatan Pembelajaran 11**

**1. Materi Pembelajaran : Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter (Lnajutan)**

**2. Tujuan Pembelajaran :**

Adapun tujuan dari pembelajaran materi ini sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa mampu mengetahui transmisi kebijakan moneter;
- 2) Mahasiswa mampu memahami studi kasus moneter.

**3. Materi Pembelajaran**

### **Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter**

Permasalahan kredit perbankan memainkan peran penting dalam perkembangan dunia usaha. Peran perbankan sangat diperlukan sebagai penyedia dana bagi perusahaan dalam berbagai bentuk pinjaman usaha yang nantinya akan digunakan untuk operasional perusahaan. Apabila hal tersebut dapat terjadi secara berkesinambungan, maka perusahaan akan turut membangun perekonomian. Perusahaan yang terus berkembang akan menjadi target bagi para investor dalam menanamkan dana dalam berbagai bentuk investasi. Interaksi antara perbankan dengan perusahaan ini akan menghasilkan berbagai dampak. Banyaknya kredit perbankan yang dikucurkan pada sector riil akan menentukan tingkat kemampuan produksi yang nantinya mempengaruhi output riil di berbagai sector ekonomi, serta berbagai macam pengaruh lain yang akan memberikan dampak bagi perekonomian secara keseluruhan.

Permasalahan muncul ketika keadaan yang terjadi di pasar kredit tidak selalu dalam kondisi keseimbangan karena adanya asymmetric information, dimana perbankan lebih selektif dalam mengucurkan kredit kepada perusahaan. Sementara di sisi lain, perusahaan sering bermasalah dengan neraca perusahaan yang berpengaruh terhadap pemberian kredit.

Apabila hal ini terjadi secara terus menerus, perkembangan di sector riil akan menjadi terhambat, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap beberapa faktor, seperti tekanan inflasi, meningkatnya pengangguran serta variable ekonomi lain yang akan berdampak buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini bank sentral dalam mengatur dan mengendalikan moneter sehingga kebijakan tersebut pada akhirnya memberikan pengaruh yang positif pada berbagai variable ekonomi dan perekonomian secara keseluruhan.

### **Transmisi Moneter dan Proses Perputaran Uang**

Mekanisme transmisi kebijakan moneter menunjukkan interaksi antara bank sentral, perbankan, lembaga keuangan lain dan pelaku ekonomi di sector riil melalui dua proses tahapan perputaran uang, yaitu : Interaksi di pasar keuangan, yaitu interaksi antara bank sentral dengan lembaga keuangan dan perbankan dalam transaksi keuangan. Interaksi melalui pasar keuangan terjadi karena di satu sisi bank sentral melakukan pengendalian moneter melalui transaksi keuangan yang dilakukan dengan perbankan sesuai dengan arah dan sasaran kebijakan moneter yang telah ditetapkan. Di sisi lain, perbankan lembaga keuangan lainnya melakukan transaksi portofolio investasi untuk kepentingannya sendiri maupun nasabah. Interaksi ini dapat terjadi melalui pasar uang rupiah, pasar valas maupun pasar modal. Adanya interaksi antara bank sentral dengan perbankan akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan volume maupun harga ( suku bunga, nilai yukar, yield obligasi atau harga saham) di ketiga pasar tersebut.

Interaksi melalui fungsi intermediasi, yaitu interaksi perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan pelaku ekonomi di sector riil. Hal ini terjadi karena fungsi intermediasi perbankan dalam memobilisasi simpanan dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit dan pembiayaan pada dunia usaha. Interaksi ini akan berpengaruh terhadap volume dan suku bunga giro, tabungan dan deposito sehingga berpengaruh terhadap jumlah uang beredar (M1, M2), permintaan uang dan tabungan masyarakat. Selain itu, interaksi ini juga akan berpengaruh terhadap perkembangan pasar modal baik ditinjau dari sisi penanaman

dana oleh para investor maupun dari sisi pembiayaan oleh perusahaan emiten. Interaksi antara pernagkan dengan pelaku ekonomi baik melalui fungsi intermediasi keuangan maupun melalui pasar modal akan berpengaruh besar terhadap perekonomian, yaitu :

- Sisi produksi : perkembangan pembiayaan dalam bentuk kredit perbankan maupun emisi saham akan berpengaruh terhadap kemampuan produksi dunia usaha sehingga akan menentukan tingkat output riil di berbagai sector ekonomi.
- Sisi permintaan : perkembangan suku bunga kredit perbankan, harga saham, yield obligasi akan menentukan besarnya biaya modal yang akan berpengaruh pada minat investasi dunia usaha.
- Konsumsi : pengaruhnya dapat terjadi melalui pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana dalam bentuk deposito perbankan , obligasi dan saham ( income effect) maupun biaya yang harus dikeluarkan apabila konsumsi tersebut dilakukan melalui kredit ( substitution effect).
- Ekspor-impor : pengaruhnya terjadi melalui perkembangan nilai tukar maupun volume dan suku bunga kredit, emisi saham dan obligasi yang diperlukan untuk membiayai kegiatan ekspor-impor tersebut.

### **Stabilitas Permintaan Uang**

Nilai tukar yang berdasarkan pada kekuatan pasar akan selalu berubah disetiap kali nilai-nilai salah satu dari dua komponen mata uang berubah. Sebuah mata uang akan cenderung menjadi lebih berharga bila permintaan menjadi lebih besar dari pasokan yang tersedia. nilai akan menjadi berkurang bila permintaan kurang dari suplai yang tersedia.

Peningkatan permintaan terhadap mata uang adalah yang terbaik karena denganmeningkatnya permintaan untuk transaksi uang, atau mungkin adanya peningkatan permintaan uang yang spekulatif. Transaksi permintaan uang akan sangat berhubungan dengan tingkat aktivitas bisnis negara berkaitan, produk domestik bruto (PDB) (gross domestic product (GDP) atau gross domestic income (GDI)) , dan tingkat permintaan

pekerja. Semakin tinggi tingkat menganggur pada suatu negara akan semakin sedikit masyarakatnya yang secara keseluruhan akan dapat menghabiskan uang pada belanja pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dan Bank Sentral, di Indonesia dalam hal ini dilakukan oleh Bank Indonesia biasanya akan sedikit kesulitan dalam melakukan penyesuaian pasokan uang yang dalam persediaan untuk mengakomodasi perubahan dalam permintaan uang berkaitan dengan transaksi bisnis.

Dalam mengatasi permintaan uang dengan tujuan untuk spekulatif, Bank Sentral akan sangat sulit untuk mengakomodasinya akan tetapi akan selalu mencoba untuk melakukan dengan melakukan penyesuaian tingkat suku bunga agar seseorang Investor dapat memilih untuk membeli kembali mata uangnya bila (yaitu suku bunga) cukup tinggi, akan tetapi, dengan semakin tinggi sebuah negara menaikkan suku bunganya maka kebutuhan untuk mata uangnya akan semakin besar pula. Dalam hal perlakuan tindakan spekulasi terhadap realitas mata uang akan berkaitan dan dapat menghambat pada pertumbuhan perekonomian negara serta para pelaku spekulasi akan terus, terutama sejak mata uang secara sengaja dibuat agar bisa dalam bawah tekanan terhadap mata uang dalam rangka untuk memaksa agar Bank Sentral dapat menjual mata uangnya untuk tetap membuat stabilitas (bila hal ini terjadi maka para spekulasi akan berusaha dapat membeli kembali mata uang tersebut dari bank dan pada harga yang lebih rendah atau selalu akan dekat dengan posisi harapan dengan demikian pengambilan keuntungan terjadi).

#### **4. Tugas/Latihan**

Setiap mahasiswa mencari jurnal nasional tentang stabilitas permintaan uang ?

#### **5. Evaluasi**

Setelah itu mahasiswa merangkumnya ?

## **K. Kegiatan Pembelajaran 12**

**1. Materi Pembelajaran : Inflasi Dan Kebijakan Moneter Di Negara Asia Pasifik**

**2. Tujuan Pembelajaran :**

Adapun tujuan dari pembelajaran ini sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa memahami tentang kondisi inflasi di negara Asia Pasifik;
- 2) Mahasiswa memahami kebijakan moneter di negara Asia Pasifik.

**3. Materi Pembelajaran**

Pertumbuhan perekonomian negara berkembang di Asia dan Pasifik masih solid karena kinerja yang baik di Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara membantu mengimbangi penurunan perekonomian Amerika Serikat dan guncangan pasar jangka pendek akibat Brexit, demikian menurut laporan baru Asian Development Bank (ADB).

Dalam Laporan Tambahan pada Asian Development Outlook 2016 (ADO 2016, terbit pada bulan Maret yang lalu), ADB kini memprakirakan perekonomian negara-negara berkembang Asia hanya akan tumbuh 5,6% pada 2016, turun dari proyeksi 5,7% sebelumnya. Untuk 2017, perkiraan pertumbuhannya masih sama pada 5,7%.

“Meskipun Brexit berpengaruh terhadap mata uang dan pasar modal negara berkembang di Asia, dampaknya terhadap ekonomi riil dalam jangka pendek diperkirakan kecil saja,” papar Shang-Jin Wei, Ekonom Kepala di ADB. “Namun, mengingat lemahnya prospek pertumbuhan ekonomi di negara-negara industri utama, para pembuat kebijakan harus tetap waspada dan tanggap terhadap potensi guncangan eksternal, demi memastikan pertumbuhan di kawasan ini tetap kuat.” Laporan Tambahan ini mencatat bahwa pertumbuhan 2016 dan 2017 dipimpin oleh Asia Selatan, terutama India, yang terus berkembang pesat, sedangkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tampaknya masih mampu mencapai proyeksi pertumbuhan sebelumnya.

Di Asia Tenggara, proyeksi pertumbuhan subkawasan ini pada 2016 dan 2017 tidak berubah sebesar 4,5% dan 4,8%, dengan kinerja solid di sebagian

besar perekonomian pada paruh pertama 2016, yang didorong oleh pengeluaran rumah tangga. Pengecualiannya adalah Viet Nam yang menghadapi tekanan perekonomian akibat memburuknya kekeringan sehingga terjadi kontraksi di sektor pertanian.

Perekonomian Indonesia tumbuh 4,9% pada triwulan pertama 2016, ditopang oleh pengeluaran rumah tangga dan investasi yang lebih kuat. Tekanan inflasi yang rendah berkat stabilnya harga bahan bakar, gas cair, dan tarif listrik, serta nilai tukar rupiah yang stabil turut mendukung pengeluaran rumah tangga. Sementara itu, belanja pemerintah tumbuh 2,9%, sesuai dengan tren rendahnya belanja pada triwulan pertama.

Pengeluaran rumah tangga diperkirakan akan sedikit naik karena inflasi yang moderat, nilai rupiah yang relatif stabil, dan diturunkannya harga energi pada bulan April, sedangkan kenaikan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang telah diumumkan dan gaji ke-14 untuk pegawai negeri akan makin meningkatkan pengeluaran rumah tangga.

ADB tetap mempertahankan prakiraan pertumbuhan untuk Indonesia sebesar 5,2% di 2016, dan 5,5 di 2017. Namun, terdapat beberapa risiko. Lebih kecilnya pendapatan dari proyeksi semula dapat menghambat rencana pemerintah untuk membangun infrastruktur, sedangkan pertumbuhan kredit yang terus melemah dapat memperlambat pulihnya investasi swasta domestik. Risiko eksternal yang utama adalah pertumbuhan global yang lebih lemah dari prakiraan awal, dan meningkatnya gejolak pasar finansial dunia.

Sementara itu di Asia Timur, sepiunya aktivitas di Republik Korea dan Hong Kong, Tiongkok, tidak mengubah prakiraan pertumbuhan 5,7% pada 2016 dan 5,6% pada 2017, dengan RRT masih mampu mencapai proyeksi pertumbuhan 6,5% pada 2016 dan 6,3% pada 2017. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah RRT diperkirakan akan terus menjalankan langkah-langkah stimulus fiskal dan moneter.

Asia Selatan diperkirakan akan menjadi subkawasan yang tumbuh paling cepat, dipimpin oleh India yang perekonomiannya berhasil mengatasi tantangan global dan akan mampu mencapai proyeksi target pertumbuhan ADB sebesar 7,4% untuk tahun fiskal 2016 (setahun sampai dengan Maret 2017), didukung oleh belanja konsumen yang kuat dan meningkatnya perekonomian perdesaan. Di Pakistan, kenaikan perbaikan lebih lanjut pada pasokan energi, peningkatan investasi infrastruktur, dan perbaikan kondisi keamanan akan membantu mendorong pertumbuhan pada 2016 dan 2017, sedangkan perekonomian Bangladesh masih kokoh berkat kekuatan sektor garmennya.

Masih lemahnya harga komoditas dan resesi di Federasi Rusia semakin menurunkan prospek pertumbuhan Asia Tengah, dengan prakiraan 2016 sebelumnya sebesar 2,1% dipangkas menjadi 1,7% dan untuk 2017 dari 2,8% menjadi 2,7%. Merosotnya pendapatan dari ekspor hidrokarbon berdampak terhadap upaya konsolidasi fiskal di Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, dan Uzbekistan, sedangkan tingkat remitansi yang menurun, terutama dari Federasi Rusia, semakin mencederai konsumsi domestik di subkawasan ini.

Di Pasifik, pertumbuhan 2016 diperkirakan akan turun ke 3,9% pada 2016 dari sebelumnya 7,1% pada 2015, dengan perekonomian Fiji yang terkena dampak berat Badai Winston. Namun, ada beberapa titik terang dengan penerimaan pariwisata yang lebih besar daripada perkiraan di Kepulauan Cook dan Samoa, sedangkan perekonomian Vanuatu terdongkrak oleh pekerjaan rekonstruksi pascabada dan proyek infrastruktur besar lainnya.

Laporan ini kini memproyeksikan inflasi di kawasan Asia yang sedang berkembang akan mencapai 2,8% pada 2016 dan 3,0% pada 2017—kenaikan 0,3 poin persentase untuk kedua tahun tersebut dari prakiraan sebelumnya. Kenaikan ini sebagian besar adalah akibat meningkatnya kembali harga minyak dan pangan. Harga minyak kembali naik setelah menyentuh titik terendahnya awal tahun ini dan harga pangan naik hampir 9% pada Juni 2016 dibandingkan setahun sebelumnya, menandai lima bulan berturut-turut indeks tersebut mengalami kenaikan.

ADB, yang berbasis di Manila, berupaya mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan yang menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan integrasi kawasan. Berdiri pada 1966, ADB akan menandai 50 tahun kemitraan pembangunan di kawasan ini pada Desember 2016. ADB dimiliki oleh 67 anggota—48 di antara berada di kawasan AsiaPasifik, termasuk Indonesia. Pada 2015, keseluruhan bantuan ADB mencapai \$27,2 miliar, termasuk pembiayaan bersama (cofinancing) senilai \$10,7 miliar.

### **Krisis Keuangan Global Di Negara Asia Pasifik**

Krisis keuangan Asia adalah periode krisis keuangan yang menerpa hampir seluruh Asia Timur pada Juli 1997 dan menimbulkan kepanikan bahkan ekonomi dunia akan runtuh akibat penularan keuangan. Krisis ini bermula di seiring jatuhnya nilai mata uang baht setelah pemerintah Thailand terpaksa mengambangkan baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai-sampai negara ini dapat dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh. Saat krisis ini menyebar, nilai mata uang di sebagian besar Asia Tenggara dan Jepang ikut turun, bursa saham dan nilai aset lainnya jatuh, dan utang swastanya naik drastis.

Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand adalah negara-negara yang terkena dampak krisis terparah. Hong Kong, Laos, Malaysia, dan Filipina juga terdampak oleh turunnya nilai mata uang. Brunei, Cina, Singapura, Taiwan, dan Vietnam tidak kentara dampaknya, namun sama-sama merasakan turunnya permintaan dan kepercayaan investor di seluruh Asia.

Rasio utang-PDB asing naik dari 100% menjadi 167% di empat negara ASEAN pada tahun 1993–96, lalu melonjak hingga 180% pada masa-masa terparah dalam krisis ini. Di Korea Selatan, rasionya naik dari 13% menjadi 21%, lalu memuncak di angka 40%. Negara industri baru lainnya masih lebih baik. Kenaikan rasio pembayaran utang-ekspor hanya dialami oleh Thailand dan Korea Selatan.

Meski sebagian besar negara di Asia memiliki kebijakan fiskal yang bagus, Dana Moneter Internasional (IMF) turun tangan melalui program senilai \$40 miliar untuk menstabilkan mata uang Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia, negaranegara yang terdampak parah dalam krisis ini. Upaya menghambat krisis ekonomi global gagal menstabilkan situasi dalam negeri di Indonesia. Setelah 30 tahun berkuasa, Presiden Soeharto terpaksa mundur pada tanggal 21 Mei 1998 di bawah tekanan massa yang memprotes kenaikan harga secara tajam akibat devaluasi rupiah. Dampak krisis masih terasa hingga 1998. Tahun 1998, pertumbuhan Filipina anjlok hingga nol persen. Hanya Singapura dan Taiwan yang agak terhindar dari krisis ini, tetapi keduanya sempat mengalami tekanan besar; Singapura ikut tertekan karena ukuran dan letak geografisnya antara Malaysia dan Indonesia. Tahun 1999, sejumlah analis mengamati bahwa ekonomi di Asia mulai pulih. Setelah krisis tahun 1997, ekonomi di Asia mulai stabil di bawah pengawasan keuangan.

Sebelum tahun 1999, Asia menarik hampir separuh arus modal ke negara berkembang. Negara-negara Asia Tenggara mempertahankan nilai tukar tinggi demi menarik investor asing yang mencari tingkat pengembalian saham tinggi. Hasilnya, Asia Tenggara menerima arus uang yang besar dan mengalami lonjakan harga aset. Pada saat yang sama, Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Korea Selatan mengalami tingkat pertumbuhan tinggi, PDB 8–12%, pada akhir 1980-an dan awal 1993. Prestasi ini diakui oleh lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia dan dijuluki sebagai "keajaiban ekonomi Asia".

Krisis Asia berpengaruh ke mata uang, pasar saham, dan harga aset lainnya di beberapa negara Asia. Indonesia, Korea Selatan dan Thailand adalah beberapa negara yang terpengaruh besar oleh krisis ini. Krisis ekonomi ini juga menuju ke kekacauan politik, paling tercatat dengan mundurnya Suharto di Indonesia dan Chavalit Yongchaiyudh di Thailand. Ada peningkatan anti-Barat, dengan George Soros dan IMF khususnya, keluar sebagai kambing hitam. Secara budaya, krisis finansial Asia mengakibatkan kemunduran terhadap ide adanya beberapa set "Asian value", yaitu Asia Timur memiliki struktur ekonomi dan politik yang superior dibanding Barat. Krisis Asia juga meningkatkan prestise

ekonomi RRT. Krisis Asia menyumbangkan ke krisis Rusia dan Brasil pada 1998, karena setelah krisis Asia bank tidak ingin meminjamkan ke negara berkembang.

Krisis ini telah dianalisis oleh para pakar ekonomi karena perkembangannya, kecepatan, dinamismenya; dia mempengaruhi belasan negara, memiliki efek ke kehidupan berjuta-juta orang, terjadi dalam waktu beberapa bulan saja. Mungkin para pakar ekonomi lebih tertarik lagi dengan betapa cepatnya krisis ini berakhir, meninggalkan ekonomi negara berkembang tak berpengaruh. Keingintahuan ini telah menimbulkan ledakan di pelajaran tentang ekonomi finansial dan "litani" penjelasan mengapa krisis ini terjadi. Beberapa kritik menyalahkan tindakan IMF dalam krisis, termasuk oleh pakar ekonomi Bank Dunia Joseph Stiglitz.

Menarik untuk menanyakan apakah krisis seperti itu dapat terjadi lagi di Indonesia di masa yang akan datang. Kemungkinannya kecil. Pertama, perlu ditekankan bahwa krisis keuangan Asia paling buruk melanda Indonesia dibandingkan semua negara lain yang terkena dampaknya karena yang terjadi di Indonesia tidak hanya krisis ekonomi. Awalnya yang terjadi adalah krisis finansial namun berkembang dan akhirnya diperparah menjadi krisis politik dan sosial yang sangat buruk di mana pemerintah tidak bersedia untuk melaksanakan reformasi ekonomi yang sangat dibutuhkan melainkan justru berusaha untuk melindungi kekuasaan mereka. Mengingat bahwa iklim politik yang tertib dan kondusif sangat penting untuk membangun kepercayaan investor, ketidakpastian dan ketegangan dalam perpolitikan di Indonesia membuat banyak investor pergi. Demikian juga setelah Suharto jatuh, ketidakpastian politik membuat banyak investor (baik asing maupun domestik) untuk tidak atau belum masuk kembali ke pasar Indonesia.

Akan tetapi saat ini, Indonesia sedang menuju demokrasi yang benar, meskipun ini adalah suatu proses yang juga disertai dengan berbagai hambatan. Pemerintahan otoriter yang pernah berkuasa selama beberapa decade telah mematikan aktivitas politik masyarakat dan lembaga-lembaga politik hingga batas-batas tertentu. Butuh waktu sebelum negara ini dapat meninggalkan sebutan negara 'demokrasi cacat' ('flawed democracy') yang diukur oleh Unit Kecerdasan Ahli Ekonomi untuk Indeks Demokrasinya. Akan tetapi pemilihan umum yang adil dan bebas memberikan kepastian bahwa ada dukungan yang lebih besar bagi pemerintah selama periode Reformasi dibandingkan masa

sebelumnya. Keputusan untuk memilih presiden secara langsung oleh rakyat Indonesia merupakan salah satu keputusan yang penting secara psikologis. Meskipun demikian, perlu digarisbawahi bahwa iklim politik di Indonesia lebih rapuh (dengan kata lain kurang stabil) dibandingkan dengan demokrasi yang sudah lama dibangun karena banyak kelompok (yang visinya berbeda) mencoba membangun posisi mereka pada demokrasi yang masih belum matang. Laporan lebih lengkap tentang topik ini silakan kunjungi bagian Reformasi.

Faktor penting lainnya yang sangat memperburuk krisis keuangan di Indonesia adalah sektor keuangan Indonesia yang sudah dalam keadaan yang sangat buruk sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh budaya patronase dan korupsi yang tidak memiliki model pengawasan yang baik. Bahkan Bank Indonesia tidak tahu tentang arus uang (sehingga menyebabkan timbulnya utang swasta jangka pendek yang sangat besar) yang masuk ke Indonesia dan menyebabkan terjadinya 'ekonomi gelembung' ('bubble economy'). Budaya patronase dan korupsi (serta kurangnya kepastian hukum) sangat menghambat fungsi ekonomi yang efisien dan merupakan bom waktu yang bisa meledak setiap saat.

Namun setelah krisis berakhir, pemerintah-pemerintah Indonesia berikutnya telah membuat langkah-langkah keuangan yang bijak untuk memastikan agar krisis serupa tidak terjadi kembali. Pengawasan terhadap likuiditas sektor perbankan sekarang ketat dan transparan, 'uang panas' ('hot money') ditangani secara lebih hati-hati (misalnya dengan membatasi utang jangka pendek), dan rasio utang pemerintah terhadap PDB lebih rendah (sekitar 25 persen dan menunjukkan tren menurun) dibandingkan kebanyakan negara-negara ekonomi maju. Pada saat krisis tahun 2008 melanda, Indonesia terkena kembali arus keluar kapital yang besar namun mampu menjamin ekonomi yang stabil karena fundamental ekonomi yang baik. Bahkan selama krisis 2008-2009 Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang kuat dengan pertumbuhan PDB sebesar 4.6 persen terutama didukung oleh konsumsi domestik.

Tetapi skandal-skandal korupsi di Indonesia masih tetap lanjut mengisi halaman surat kabar. Korupsi dan pengelompokan modal pada sekelompok elit kecil masih menjadi masalah serius di negeri ini dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang efisien,

baik dan adil. Terutama korupsi politik menyebar luas dan sering kali digunakan politisi untuk mencari keuntungan dalam sektor bisnis nasional.

#### **4. Tugas/Latihan**

Setiap mahasiswa mencari kasus krisis yang terjadi di salah satu negara Asia ?

#### **5. Evaluasi**

Selanjutnya mahasiswa merangkumnya ?

## DAFTAR PUSTAKA

- Hossain. 2010. *Bank sentral dan kebijakan moneter di asia-pasifik*. Jakarta: Rajawali Pers
- Bank Indonesia. *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. Beberapa edisi.
- Mishkin, Frederic S. 2007. *The Economics of Money, Banking, and Financial Market*. Person Addison Wesley.
- Nelson, Charles. R. 2010. *Macroeconomics: an Introduction. The Demand for Money*. Internet Edition 2010.
- Rahardjo, Mugi. 2009. *Ekonomi Moneter*. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS.
- Samuelson, Paul A and William D. Nodhaus. 2005. *Economics*. 8th ed. MCGraw –Hill International Edition